

Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan pada Kabupaten Bima

M. Rimawan^{1,a,*}, Fenny Aryani^{1,b}

¹STIE Bima

^arimawan111@gmail.com, ^bfennyaryani@gmail.com

*Corresponding Author

| Artikel Info | Abstrak |
|---|---|
| Tanggal Publikasi 2019-09-23 | Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut memiliki peran penting dalam penciptaan kesejahteraan, peningkatan taraf hidup dan tersedianya lapangan kerja. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun ADD dalam kurun waktu lima tahun ini cenderung meningkat dan sangat tajam di tahun 2015-2018, namun tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima cenderung fluktuatif, indeks pembangunan manusia meningkat dan kemiskinan mengalami fluktuatif. Dengan demikian tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis dampak ADD terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan di Kabupaten Bima. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat statistic WarpPLS, data panel yang mencakup 18 kecamatan dan data runut waktu tahun 2015 hingga 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia sedangkan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. |
| Kata Kunci Alokasi dana desa Pertumbuhan ekonomi Indeks pembangunan manusia Kemiskinan | |

1. PENDAHULUAN

Desa adalah salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Menurut Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Salah satu strategi pemerintah dalam hal memberi dukungan keuangan desa dan membantu agar desa menjadi mandiri adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% untuk desa disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam rangka mengatasi kesenjangan antarwilayah dan antara desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan (prasetyo,2014)

Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan keperdesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan karena

dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan merata sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Alokasi dana desa yang diterima oleh desa sangatlah besar, dikarenakan adanya program dana desa yang merupakan kebijakan dari pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta mendukung kemandirian desa. Alokasi dana desa diprioritaskan pada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat desa, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan di desa.

Penggunaan dana desa ini memperkuat anggapan bahwa dana desa belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama penyerapan tenaga kerja dari kelompok miskin dan pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dapat dimengerti jika dana desa juga belum dapat mengurangi angka kemiskinan yang mendapatkan dana desa paling besar, terutama karena hanya sebagian kecil dana yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu alokasi dana yang lebih besar untuk pembangunan fisik belum terkait langsung dengan tingkat kemiskinan, karena pembangunan fisik umumnya bersifat barang publik. Memiliki kekayaan SDA melimpah, wilayah strategis, serta mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian. Bisa dilihat dari Kabupaten Bima yang mempunyai 18 kecamatan terdiri dari 191 Desa.

Pengalokasian dana desa sudah dimulai 2015, Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulus atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBD desa. Data menunjukkan Kabupaten Bima pada tahun 2015 jumlah dana desa adalah sebesar Rp 140, 5 miliar rupiah, 2016 Rp. 121,8 milyar, 2017 Rp. 155,2 Milyar dan meningkat menjadi Rp.156, 5 milyar di tahun 2018, yang akan disalurkan ke 191 desa. (BPS Kabupaten Bima, 2019).

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan UU Desa adalah bagaimana agar dana yang masuk ke desa dapat dibagi menjadi adil kesetiap desa, mengingat tingginya keberagaman ukuran (Penduduk, Luas wilayah), Tingkat Kemiskinan di daerah dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di desa di Indonesia. Tantangan kedua adalah bagaimana anggaran desa dapat dan digunakan secara efisien dan efektif oleh desa untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pada Kabupaten Bima penggunaan Dana Desa berdasarkan data yang ada 84 % dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, sebanyak 6,5% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sisanya untuk kegiatan pemerintah dan sosial kemasyarakatan. Walaupun pembangunan infrastruktur dapat saja dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui pemilihan jalan infrastruktur yang berdampak pada ekonomi, namun di lapangan banyak ditemukan di desa banyak membangun prasarana seperti gapura desa, pagar desa yang kecil dampaknya terhadap ekonomi apalagi pengurangan kemiskinan. Peran aparat sangat penting dalam pengelolaan dana desa dalam hal ini pemerintah kabupaten Bima untuk mengawal penggunaan dana desa agar efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan sesuai dengan nawacita pemerintah pusat "membangun dari pedesaan".

Perlu penajaman penggunaan dana desa dengan lebih menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu dilakukan melalui prioritas belanja modal sektor tertentu terutama pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan,

pendidikan dan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Pada hakekatnya kebijakan alokasi dana desa merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ini melalui memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan pemerataan yang sebaik mungkin sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (BPS, 2014)

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori *prinsipal-agen* menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi (Ramadona (2016). Dalam kaitannya dengan isu penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dipandang sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*, dan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara *principal agent*.

Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa disebutkan bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Pandangan ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Jumlah penduduk, 2) Jumlah stok barang-barang modal, 3) Luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) tingkat teknologi yang digunakan.

Wujud dari adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah ditandai dengan adanya perkembangan secara fisik produksi barang dan jasa di suatu daerah, diantaranya yaitu dengan bertambahnya hasil produksi dibidang barang, jasa serta industri, ada perkembangan infrastruktur, penggunaan dan pemanfaatan teknologi modern dalam kegiatan produksi serta peningkatan jumlah modal.

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhannya ekonominya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang

per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari.

Tujuan dari penelitian ini ingin menguji adakah pengaruh antara alokasi danan desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H1 - = Alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bima
- H2 = Alokasi dana desa terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Bima
- H3 = Alokasi dana desa terhadap kemiskinan pada Kabupaten Bima

2. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima selama periode 2015 sampai 2018, Jenis data yang akan digunakan dalam analisis di penelitian ini adalah Data kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu alokasi dana desa, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kemiskina. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder Yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan dokumen, data diperoleh dari *website* BPS Kabupaten Bima dan *website* resmi Kementrian desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 tahun dari 2015 - 2018, tehnik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh dimana Alat Statistik yang digunakan adalah WARP PLS 3.0 (Partial Least Square).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Outer model

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian outer model. Outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator indikatornya. KONSTRUK TERBAGI MENJADI DUA yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen merupakan konstruk penyebab konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lain. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. Penelitian outer model meliputi uji validitas dan reabilitas karena data yang digunakan adalah data terukur.

Perhitungan Nilai Goodness of Fit (Inner Model)

Model struktural atau *Inner Model* pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan referensi dan teori tersebut disebut *Fit* apabila didukung oleh data empiris. Perhitungan nilai *Goodness of Fit* didasarkan pada hasil SEM WarpPLS. Hasil pengujian model *Goodness of fit* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian SEM

| Variabel | R- square |
|----------------------------------|-----------|
| Alokasi dana desa (ADD) | = |
| Pertumbuhan ekonomi (PE) | 1,000 |
| Indeks pembangunan manusia (IPM) | 0,958 |
| Kemiskina (KM) | 0.994 |

Goodness of fit inner model pada analisis PLS menggunakan ukuran *Stone-Geisser Q-Square* test yang berupa nilai *Q-square predictive relevance* dihitung berdasarkan nilai R^2 masing-masing variabel endogen, yaitu variabel belanja modal diperoleh nilai RPE^2 sebesar 1.000 ; variabel Indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai $RIPM^2$ sebesar 0,958; RKM^2 sebesar 0,994 dengan demikian nilai *Q-square predictive relevance* sebesar:

$$\begin{aligned}
 Q2 &= 1 - (1-RPE^2) (1-RIPM^2)(1-RKM^2) \\
 &= 1 - (1-1,000) (1-0.958) (1-0.994) \\
 &= 1 - (0) (0.042) (0.006) \\
 &= 1 - 0.00025 \\
 &= 0.99
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, diperoleh nilai *Q-Square predictive relevance*, menurut Abdillah dan Jogiyanto (2009) jika hasil menunjukkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang), dan > 0.35 (besar). Dalam pengujian yang dilakukan untuk penelitian ini menunjukkan hasil sebesar 0.99 atau 99% sehingga model dikatakan memiliki nilai prediktif yang kuat atau besar karena variabel-variabel dalam model yang meliputi variabel Alokasi dana desa, mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, indek pembangunan Manusia dan kemiskinan sebesar 99% atau 0.99 sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

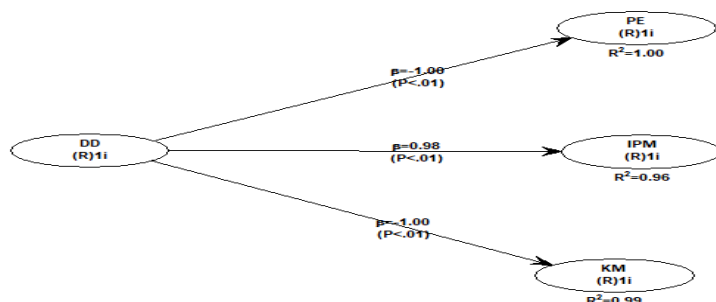
Tabel 2 Nilai Goodness of Fit Model

| Hasil | P - Value | Kriteria | Keterangan |
|--------------|-----------|------------------|------------|
| APC = 0,992 | P< 0,001 | Good if P < 0.05 | Diterima |
| ARS = 0,984 | P< 0,001 | Good if P < 0.05 | Diterima |
| AVIF = 1,056 | | P< 5 | Diterima |

Interpretasi indikator model fit dalam penelitian ini memenuhi kriteria nilai Goodness of Fit Model sehingga model penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan beberapa dan menguji hipotesis.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable eksogen terhadap variable endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa sedangkan variabel endogen adalah pertumbuhan ekonomi , indeks pembanguna manusia dan kemiskinan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai beta (β) antar variabel dan *p -value* . hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan warp pls 3.0 ditunjukan sebagai berikut



Gambar 1. hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan warp pls 3.0

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai keofisian β sebesar 1,00 (minus) dengan *p-value* <0,01 yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di kabupaten bima sudah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Afrilianto(2017) yang mengatakan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien β sebesar 0.98 (positif) dengan p -value $<0,01$ yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di kabupaten bima sudah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien β sebesar -1,00 (negatif) dengan p -value $<0,01$ yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di kabupaten bima belum mampu mengurangi kemiskinan di kabupaten bima, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Dianti *et.,al* 2018) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa tidak dapat mengurangi kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistic serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : (1) Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa belum maksimal. (2) Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia hal ini menunjukkan semakin baik pengelolaan alokasi dana desa maka indeks pembangunan manusia akan semakin bagus dan kesejahteraan desa akan bagus. (3) Alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan alokasi dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan dan penggunaan dana desa belum maksimal selanjutnya aparat desa di harapkan lebih memperhatikan pengalokasian dana desa agar tepat, Aparat desa di harapkan lebih memperbanyak program Pemberdayaan Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afrilianto.2017. *analisis dampak alokasi desa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten bogor*.jurnal ipb.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dianti *et,al* .2018. *pengaruh alokasi dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi, vol 18 no 04 tahun 2018.
- Ghozali and H. Latan, *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0*, Edisi 2. Universitas Diponegoro, 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Website www.kemendes.go.id.
- Website www.djpk.depkeu.go.id.
- Website www.bimakab.go.id
- Website www.bimakab.bps.go.id